

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI
DAERAH, DAN DANA ALOKASI UMUM
TERHADAPPENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL PADA
PEMERINTAH JAWA TIMUR**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Akuntansi



Oleh:

MEYTA PUTRI HARDIANA
NIM : 2014310815

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2018**

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

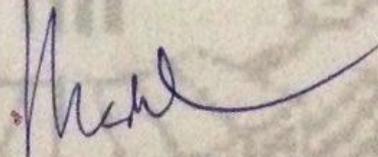
Nama : Meyta Putri Hardiana
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 22 Mei 1996
N.I.M : 2014310815
Program Studi : Akuntansi
Program Pendidikan : Sarjana
Kosentrasi : Akuntansi Keuangan
Judul : Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Jawa Timur.

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,

Tanggal:

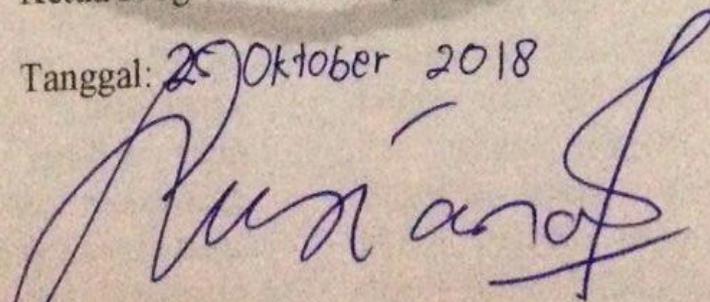
9 Okt '18



(Dra. Gunasti Hudiwinarsih, M.Si., Ak., CA.)

Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi,

Tanggal: 20 Oktober 2018



(Dr. Luciana Spica Almilia, S.E., M.Si., QIA., CPSAK)

THE INFLUENCE OF ECONOMIC GROWTH, REGIONAL ORIGINAL REVENUE, AND GENERAL ALLOCATION FUNDS ON THE ALLOCATION OF CAPITAL EXPENDITURE BUDGET TO THE GOVERNMENT IN EAST JAVA

Meyta Putri Hardiana
STIE Perbanas Surabaya
meytahardianap@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to provide empirical evidence about the effects of Economic Growth, Regional Original Revenue (PAD), and General Allocation Funds (DAU) on the allocation of capital expenditure budget to the government in East Java. The sample used in this study were 38 districts / cities in East Java taken from the Report of Actual Income and Expenditure Budget (budget) from the years 2012-2016. Methods of data collection used in this study is whole population census methods. Analysis tool used in this study is multiple linear regression with a t test, f test, and test the coefficient of determination. The results of this study indicate that Economic Growth, Local Own Revenue (PAD), and the General Allocation Fund (DAU) had no significant effect on the Capital Expenditure.

Keywords: APBD, capital expenditure, and economic growth.

PENDAHULUAN

Peningkatan alokasi anggaran belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur, peralatan dan infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian karena semakin tinggi belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian. Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif seperti untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Darwanto dan Yustikasari (2006) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk

program-program pelayanan publik. Kedua pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Boediarso Teguh Widodo mengatakan, anggaran transfer ke daerah dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dari alokasi Rp 81 triliun hingga saat ini sudah menjadi Rp 766 triliun. Begitu pula alokasi anggaran belanja di APBD dalam kurun waktu yang sama, juga meningkat hampir 12 kali lipat dari Rp 93 triliun kini menjadi Rp 1.097 triliun. Kenaikan dari belanja APBD dan transfer tidak diikuti dengan

pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien. Transformasi pengelolaan keuangan negara merupakan suatu kebutuhan yang mendesak dan krusial. Perlu untuk segera dilakukan transformasi tersebut, mengingat pengelolaan APBN dan APBD masih terdapat celah-celah yang masih bisa diperbaiki agar bisa lebih efektif, efisien, optimal dan produktif (finance.detik.com).

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang dijadikan dasar dalam pedoman Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah sering disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kota dan kabupaten. Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan jasa pada tahun anggaran harus dianggarkan dalam APBD (Kawedar dkk, 2008).

Penyusunan APBD diawali dengan membuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang kebijakan umum APBD dan anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan kebijakan umum APBD dan anggaran yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Harianto, 2007).

Berdasarkan GAP penelitian diatas dan memperhatikan pentingnya pengalokasian anggaran belanja modal untuk kepentingan pelayanan publik maka judul

penelitian ini adalah **“PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL”**.

KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Konsep teori keagenan menurut Anthony dan Govindarajan dalam Siagian (2011:10) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antar manager dengan pemegang saham. Pemegang saham mempekerjakan manager untuk melakukan tugas untuk kepentingan pemegang saham, termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari pemegang saham kepada manager.

Sebelum Penyusunan APBD dilakukan terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Badrudin (2012:97) berpendapat bahwa APBD adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan

belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut Peraturan Daerah.

Abdul Halim (2004) menyatakan bahwa APBD terdiri dari beberapa komponen:

1. Anggaran Pendapatan, yang terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain.
 - b. Bagian dana perimbangan, yang meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
 - c. Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.
2. Anggaran belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.
3. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja Belanja Administrasi Umum.

Kelompok belanja ini mencakup Jenis Belanja baik Untuk Bagian Belanja Aparatur Daerah maupun Pelayanan Publik (Bastian, 2002). Belanja modal dapat dikategorikan menjadi 5 (lima) kategori utama (Syaiful, 2008) yaitu Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Modal Fisik Lainnya.

Pertumbuhan Ekonomi

Kuznets Simon dalam Jhingan (2000:57) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari aspek dinamis suatu perekonomian, yaitu melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu.

Pendapatan Asli Daerah

Abdul Halim (2004:67) mendefinisikan pengertian Pendapatan Asli Daerah sebagai semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yang dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. UU Nomor 25 tahun 1999

disebutkan sumber pendapatan daerah terdiri dari:

1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Retribusi Daerah
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
5. Dana perimbangan dari pemerintah pusat
6. Dana Alokasi Umum
7. Dana Alokasi Khusus

Adapun cara alternative untuk pemungutan pendapatan daerah yang harus dibuatkan sebagai pencarian dana dengan cara:

1. Penerbitan obligasi daerah
2. Pinjaman kepada pihak luar
3. Membuat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
4. Bekerjasama dengan pihak swasta ke III (investor) untuk membuat dan mengembangkan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis strategis.

Dana Alokasi Umum

Mahsun (2011:40) DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penetapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan potensi daerah. DAU secara tidak langsung berpengaruh terhadap alokasi untuk pembiayaan yang membiayai belanja pegawai seperti gaji, tunjangan, belanja bagi hasil kepada Kabupaten/kota dan pemerintahan di desa-desa, dan belanja yang tak terduga. Dalam setiap tahunnya terjadi inflasi belanja secara tidak langsung yang disebabkan oleh meningkatnya

jumlah kenaikan pegawai terutama PNS.DAU tidak signifikan jika dibandingkan dengan kenaikan gaji pegawai.

Pengaruh Antara Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

Pertumbuhan ekonomi yang baik harus didukung dengan infrastruktur atau sarana prasarana yang memadai guna memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat, sedangkan sarana dan prasarana tersebut didapatkan dari pengalokasian anggaran belanja modal yang sudah dianggarkan setiap tahunnya dalam APBD. Dengan demikian, ada pengaruh antara pertumbuhan ekonomi dengan pengalokasian belanja modal. Bila pertumbuhan ekonomi suatu daerah baik, maka pemerintah daerah setempat akan terus meningkatkan alokasi belanja modalnya dari tahun ke tahun guna melengkapi dan memperbaiki sarana dan prasarana, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan situasi pada saat tahun anggaran.

Alokasi belanja modal yang besar dapat mendorong pemerintah daerah untuk membangun sarana dan prasarana yang bermanfaat bagi setiap masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Luh Putu Rani Mayasari, Ni Kadek Sinarwati, dan Gede Adi Yuniarta (2014) bahwa peningkatan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Belanja Modal.

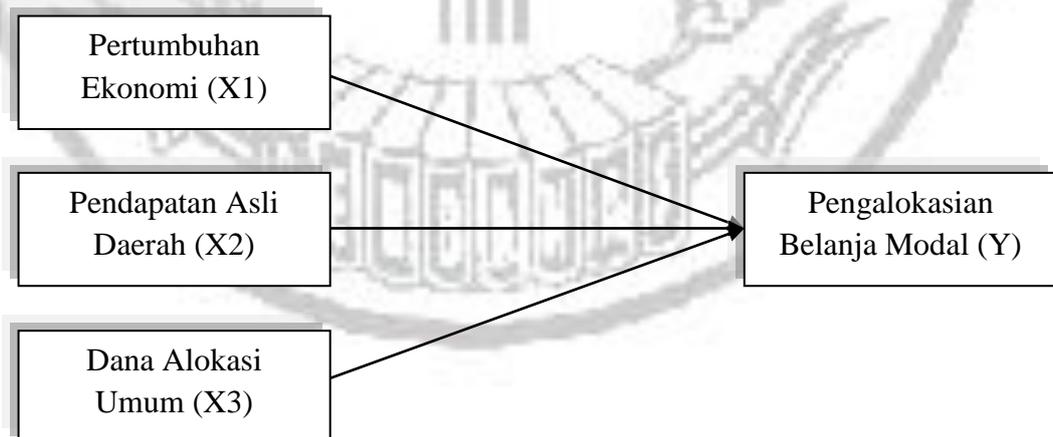
Pengaruh Antara Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembiayaan untuk anggaran belanja modal. PAD didapatkan dari iuran

langsung dari masyarakat, seperti pajak, redistribusi, dan lain sebagainya. Tanggung jawab agen (pemerintah daerah) kepada prinsipal (masyarakat) adalah memberikan pelayanan public (*public service*) yang baik kepada masyarakat melalui anggaran belanja modal, karena masyarakat telah memberikan sebagian uangnya kepada pemerintah daerah. Bentuk pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai di daerahnya. Pengadaan infrastruktur atau sarana prasana tersebut dibiayai dari alokasi anggaran belanja modal dalam APBD tiap tahunnya. Dengan demikian, ada pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pengalokasian belanja modal. Penelitian yang dilakukan Siti Haniatun Maslikah (2015) menunjukkan bahwa adanya pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal.

Pengaruh Antara Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

Dana Alokasi Umum yang didapatkan dari dana APBN yang dialokasikan untuk pemerintah keuangan antar daerah untuk pembiayaan pengeluaran daerah. Jika suatu daerah memiliki DAU yang kecil maka kebutuhan daerahnya juga ikut kecil. Suatu daerah yang memiliki DAU yang besar cenderung akan memiliki belanja modal yang rendah karena DAU digunakan untuk membiayai biaya lain seperti belanja pegawai, barang, jasa, dan lainnya. Berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan Prasetya Ikhwan (2017) bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal. Kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1
Kerangka Pemikiran Teoritis

Hipotesis Penelitian

H1 : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal

H2 : Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal

H3 : Dana alokasi umum berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif dimana penelitian ini merupakan penelitian yang menekankan pengujian teori atau hipotesis melalui pengukuran variabel penelitian dalam angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik yang berfungsi untuk mengetahui jumlah atau besaran dari sebuah objek yang akan diteliti. Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data Sekunder dapat diukur satuannya dan biasanya berupa angka-angka (Hadi, 2004:74). Data Sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini jumlah realisasi anggaran Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) periode 2012-2016. Penelitian ini juga termasuk sebagai penelitian kausal komparatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu variabel (objek penelitian), antara subjek yang berbeda atau waktu yang berbeda dan menemukan hubungan sebab-akibatnya.

Identifikasi Variabel

Variabel penelitian yang digunakan terdiri atas variabel dependen dan

variabel independen dengan rincian sebagai berikut:

1. Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini yaitu Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

2. Variabel independen (X) dalam penelitian ini yaitu:

X1 : Pertumbuhan Ekonomi

X2 : Pendapatan Asli Daerah

X3 : Dana Alokasi Umum

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Belanja Modal

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Indikator variabel belanja modal diukur dengan :

Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigrasi, dan Jaringan + Belanja Aset Tetap Lainnya

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output per kapita. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian daerah dalam suatu tahun tertentu. Pertumbuhan Ekonomi diukur dengan rumus :

Pertumbuhan Ekonomi =

$\frac{PDBt - PDBt-1}{PDBt-1} \times 100\%$

PDBt-1

Keterangan:

PDBt :Pendapatan nasional pada tahun t

PDBt-1 :Pendapatan nasional pada tahun t (tahun sebelumnya)

Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Variabel Pendapatan Asli daerah diukur dengan rumus :

PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain PAD yang Sah

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer yang bersifat umum dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk mengatasi ketimpangan horizontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Dana Alokasi Umum untuk masing-masing Kabupaten / Kota dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD.

Perhitungan Dana Alokasi Umum Menurut UU No. 33 Tahun 2004

DAU = Jumlah Dana Alokasi

Umum dari masing-

masing kabupaten/kota

Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah kota / kabupaten di Jawa Timur dari tahun 2012-2016. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur. Teknik penelitian ini menggunakan metode sensus. Metode sensus adalah metode dengan mengambil sampel seluruh kabupaten dan kota yang ada di Jawa Timur. Data sampel yang digunakan adalah kabupaten dan kota di Jawa Timur yaitu 38 kabupaten / kota.

Data dan Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji data sekunder yang berupa Laporan APBD yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui internet. Dari Laporan APBD ini diperoleh data mengenai jumlah anggaran alokasi Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2012-2016.

Analisis Deskriptif

Menurut Ghozali (2016:19) menjelaskan bahwa statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat

dari nilai rata-rata, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, dan *range*. Penyajian statistik deskriptif bertujuan untuk melihat profil dari data penelitian tersebut dengan hubungan yang ada antar variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal.

Asumsi Klasik

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah menggunakan regresi linier berganda merupakan metode analisis yang tepat untuk digunakan sehingga nilai yang dihasilkan dapat dinyatakan sebagai nilai yang akurat. Berikut ini adalah pengujian yang diperlukan:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas menurut Sujarweni (2015:120) adalah melakukan perbandingan antara data yang kita miliki dengan data berdistribusi normal yang memiliki mean dan standar deviasi yang sama dengan data kita. Pengujian ini digunakan untuk mengukur apakah variabel-variabel diatas terdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji normal tidaknya variabel, peneliti menggunakan uji statistik Kolgomorov Smirnov. Jika data memiliki signifikansi lebih dari 5% atau 0,05 maka data tersebut dianggap berdistribusi normal.

b. Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (variabel independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi

diantara variabel independen (Ghozali, 2013:103). Suatu model dikatakan bebas dari multikolinieritas jika nilai Tolerance $\geq 0,1$ dan $VIF \leq 10$ maka variable tersebut tidak mempunyai masalah multikolinearitas dengan variable bebas lainnya. Dan jika memiliki nilai tolerance lebih $\leq 0,1$ dan $VIF \geq 10$ maka data dapat dinyatakan mengandung multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi perbedaan *variance* residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Jika *variance* residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas dapat terjadi apabila ada salah satu Pvalue variable independent pada uji t yang signifikan (lebih kecil dari 0,05).

Regresi Linier Berganda

Regresi berganda berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen. Koefisien diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel depnden dengan suatu persamaan (Ghozali, 2013:93). Hubungan antar variabel tersebut dapat digambarkan dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 PDRB + \beta_2 PAD + \beta_3 DAU + \beta_3 DAK + e$$

Dimana :

Y = Belanja Modal (BM)

α = Konstanta

β = Slope atau Koefisien Regresi

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PAD = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

DAU = Dana Alokasi Umum (DAU)

DAK = Dana Alokasi Khusus (DAK)

$e = error$

Uji Hipotesis

a. Uji F

Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2005). Di dalam hal ini hipotesis yang digunakan adalah:

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ (tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen, sehingga model regresi).

$H_1 : \beta_1 - \beta_3 \neq 0$ (terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen, sehingga model regresi fit). Kriteria pengujian yang akan digunakan adalah $\alpha = 0,05$, jika nilai signifikan lebih besar dari α , maka H_0 diterima H_1 ditolak dan jika sebaliknya jika nilai signifikan lebih kecil dari α , maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

b. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013:95). Nilai interval pada koefisien determinasi atau nilai tersebut mendekati 1, maka semakin baik untuk model regresi dan mampu menjelaskan perubahan pada variabel dependen yang ada. Semakin rendah

nilai koefisien determinasi atau nilainya mendekati 0, maka variabel independen yang ada tidak dapat menjelaskan perubahan pada variabel dependen yang dimiliki.

c. Uji t

Ghozali (2013:97) menyebutkan bahwa uji statistic t digunakan untuk melihat seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ (secara parsial variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen)

$H_1 : \beta_1 - \beta_3 \neq 0$ (secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen). Kesimpulan H_0 ditolak jika nilai probabilitas $< \alpha = 0,05$, jadi semua variabel independen (X_1, X_2, X_3) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Begitu pula sebaliknya, H_0 diterima jika probabilitas signifikan $> \alpha = 0,05$. Jadi semua variabel independen (X_1, X_2, X_3) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Tabel 4.1
Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Alokasi Anggaran Belanja Modal	34	73.434.892.386	2.486.345.703.617	517.250.802.240	573.779.394.366

Sumber: Hasil olah data SPSS

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.1 diketahui bahwa Alokasi Anggaran Belanja Modal yang sifatnya menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai Alokasi Anggaran Belanja Modal untuk tahun 2012-2016, nilai belanja modal paling kecil (*minimum*) adalah Rp. 73.434.892.386 yang dimiliki pada kota Probolinggo. Nilai alokasi anggaran belanja modal yang paling kecil adalah kota Probolinggo dikarenakan pada kota Probolinggo luas wilayahnya lebih kecil dan untuk pembangunan pelayanan sarana dan prasarana layanan publik hanya sedikit. Selanjutnya untuk nilai paling besar (*maximum*) adalah Rp. 2.486.345.703.617 yang dimiliki pada kota Surabaya pada tahun 2015. Kota Surabaya memiliki nilai

tertinggi dikarenakan belanja untuk perbaikan jalan, irigasi, dan jaringan yang tinggi untuk memfasilitasi dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Rata-rata nilai alokasi anggaran belanja modal tahun 2012-2016 adalah Rp. 517.250.802.240 dengan standar deviasi Rp. 573.779.394.366. Standar deviasi yang lebih besar dari rata-rata, sehingga dapat dikatakan bahwa alokasi anggaran belanja modal bersifat heterogen. Untuk kabupaten/kota yang memiliki nilai dibawah rata-rata yaitu Bangkalan, Blitar, Bojonegoro (2012-2013), Lamongan (2012-2015), Lumajang, Malang, Mojokerto, Pamekasan, Pasuruan (2015), Ponorogo, Probolinggo, Sampang (2014-2015), dan Trenggalek.

Tabel 4.2
Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Anggaran Pertumbuhan Ekonomi	34	3.545.800.000	451.486.800.000	55.837.310.870	112.947.514.238

Sumber: Hasil olah SPSS

Tabel 4.2 menggambarkan nilai anggaran pertumbuhan ekonomi Kabupaten/kota untuk tahun 2012-2016. Jumlah anggaran pertumbuhan ekonomi paling rendah pada kota Blitar yaitu sebesar Rp.

3.545.800.000. Kecilnya anggaran pertumbuhan ekonomi di kota Blitar disebabkan karena sumber daya manusia yang tidak bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada disekitar daerah tersebut.

Anggaran Pertumbuhan ekonomi yang tertinggi pada kota Surabaya yaitu sebesar Rp. 451.486.800.000, karena kota Surabaya mampu mengelola dana untuk membangun sarana dan prasarana dengan baik dan mampu mengelola sumber daya manusia untuk membantu meningkatkan anggaran pertumbuhan ekonomi. Rata-rata dari anggaran pertumbuhan ekonomi tersebut sebesar Rp. 55.837.310.870 dengan standar deviasi dari anggaran pertumbuhan ekonomi tersebut sebesar Rp. 112.947.514.238, dimana standar lebih besar dari rata-

rata sehinggadapat dikatakan bahwa data anggaran pertumbuhan ekonomi bersifat heterogen. Kabupaten/kota yang memiliki nilai dibawah rata-rata yaitu Bangkalan, Banyuwangi (2012-2013), Batu, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Jember (2012-2014), Jombang, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang (2012-2015), Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, dan Tulungagung

Tabel 4.3
Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Anggaran PAD	34	48.055.974.750	3.944.467.129.125	521.912.299.494	996.779.146.196

Sumber: Hasil olah SPSS

Nilai minimum pada tabel 4.3 menunjukkan jumlah anggaran PAD terkecil selama lima tahun di Jawa Timur. Jumlah Anggaran Pendapatan Asli Daerah yang terkecil pada kota Mojokerto dengan jumlah Rp. 48.055.974.750. Hal ini disebabkan karena hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan rendah dan membuat kota Mojokerto memiliki nilai terkecil. Nilai Pendapatan Asli Daerah yang terbesar dimiliki kota Surabaya dengan jumlah Rp. 3.944.467.129.125, karena pada kota Surabaya juga sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur dan juga memiliki nilai pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD lain-lain yang sah yang cukup tinggi. Rata-rata nilai anggaran Pendapatan Asli Daerah tahun 2012-2016 adalah

Rp. 521.912.299.494 dengan standar deviasi anggaran Pendapatan Asli Daerah tahun 2012-2016 adalah Rp. 996.779.146.196, dimana standar deviasi tersebut lebih besar daripada rata-rata, artinya bahwa data anggaran Pendapatan Asli Daerah bersifat heterogen. Kabupaten/kota yang memiliki nilai dibawah rata-rata adalah Bangkalan, Blitar, Bojonegoro, Lamongan, Lumajang, Malang, Mojokerto, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, dan Trenggalek.

Tabel 4.4
Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Anggaran DAU	34	309.102.871.000	1.200.889.359.000	793.032.027.988	294.857.069.499

Sumber: Hasil olah data SPSS

Tabel 4.4 telah menggambarkan anggaran dana alokasi umum yang diterima oleh kabupaten/kota di Jawa Timur pada tahun 2012-2016. Kabupaten/kota yang menerima anggaran dana alokasi umum yang terendah adalah kota Mojokerto yaitu dengan jumlah Rp. 309.102.871.000. Hal ini disebabkan karena kecilnya potensi didaerah Mojokerto sehingga kebutuhan pendanaan juga kecil. Kota tertinggi yang menerima dana alokasi umum adalah Surabaya yaitu sebesar Rp. 1.200.889.359.000. Kota Surabaya memiliki anggaran dana alokasi umum yang tertinggi karena banyak sektor-sektor yang dapat dikembangkan di Kota Surabaya yang membutuhkan anggaran dana alokasi umum untuk

membayai setiap kegiatannya. Rata-rata anggaran dana alokasi umum tersebut sebesar Rp. 793.032.027.988 dari beberapa sampel kabupaten/kota di Jawa Timur dengan standar deviasi dari anggaran dana alokasi umum sebesar Rp. 294.857.069.499 yang menunjukkan bahwa standar deviasi yang lebih kecil dari rata-rata, sehingga dapat dikatakan bahwa data Anggaran Dana Alokasi Umum bersifat homogen. Untuk kabupaten/kota yang memiliki nilai dibawah rata-rata adalah Blitar, Bojonegoro (2012), Malang (2013), Mojokerto, Pamekasan (2012-2014), Probolinggo, dan Sampang.

Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tabel 4.5
Hasil Uji Normalitas

	Unstandadiz ed Residual
N	34
Test Statistic	0.084
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.200 ^{c, d}

Sumber: Hasil olah data SPSS

Berdasarkan hasil pengelolaan data SPSS pada tabel 4.5 dapat diketahui bahwa nilai *Kolmogorov-Smirnov* adalah 0.084 dan *Adymp.Sig* (2-tailed) sebesar 0.200. Nilai signifikan tersebut lebih dari 0.05 ($0.200 > 0.05$). Hal ini menunjukkan bahwa data residual Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah,

dan Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal dalam penelitian ini berdistribusi normal.

b. Uji Multikolonieritas

Tabel 4.6
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Pertumbuhan Ekonomi	0.371	2.698
PAD	0.262	3.822
DAU	0.372	2.689

Sumber: Hasil olah data SPSS

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan hasil *tolerance* anggaran pertumbuhan ekonomi sebesar 0.371, anggaran pendapatan asli daerah sebesar 0.262, dan anggaran dana alokasi umum sebesar 0.372, ketiga variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai *tolerance* diatas 0.1 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. Hasil perhitungan nilai VIF menunjukkan ketiga variabel

independen yang menunjukkan angka dibawah 10 yang pertama adalah anggaran pertumbuhan ekonomi memiliki nilai VIF 2.698, anggaran pendapatan asli daerah memiliki nilai VIF sebesar 3.822, dan anggaran dana alokasi umum yang memiliki nilai VIF sebesar 2.689. jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari mutikolonieritas antar variabel.

c. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.7
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.255E+10	3.089E+10		0.406	0.688
Perumbuhan Ekonomi	0.319	1.390	0.065	0.230	0.820
PAD	-0.125	0.307	-0.137	-0.406	0.688
DAU	0.089	0.066	0.383	1.354	0.186

Sumber: Hasil olah data SPSS

Berdasarkan tabel 4.7 pada pengujian uji glistier diatas menunjukkan bahwa untuk masing-masing variabel independen memiliki nilai signifikan yaitu anggaran pertumbuhan ekonomi 0.820, anggaran pendapatan asli daerah 0.688, dan anggaran dana alokasi umum 0.186. Dimana tidak ada variabel independen yang memiliki nilai signifikan kurang dari 0.05. jadi dapat disimpulkan bahwa

dalam model regresi tidak terdapat heteroskedstisitas.

Regresi Linier Berganda

Persamaan regresi linier berganda sebagai berikut ini:

$$\text{Alokasi Anggaran Belanja Modal} = 1.303E+10 + 3.695PDRB + 0.919PAD + 0.123DAU + e$$

Penjelasan dari persamaan tersebut adalah sebagai berikut:

- Konstanta (β_0) sebesar 1.303E+10 menunjukkan bahwa apabila

variabel independen bernilai 0 (nol), maka belanja modal akan meningkat sebesar 1.303E+10.

- b. Koefisien regresi (β_1) untuk Anggaran Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3.695 menunjukkan bahwa apabila Anggaran Pertumbuhan Ekonomi meningkat satu satuan maka nilai belanja modal akan meningkat sebesar 3.695.
- c. Koefisien regresi (β_2) untuk Anggaran Pendapatan Asli

Daerah sebesar 0.919 menunjukkan bahwa apabila Anggaran Pendapatan Asli Daerah meningkat satu satuan maka nilai belanja modal akan meningkat sebesar 0.919.

- d. Koefisien regresi (β_3) untuk Anggaran Dana Alokasi Umum sebesar 0.123 menunjukkan bahwa apabila Anggaran Dana Alokasi Umum meningkat satu satuan maka nilai belanja modal akan meningkat sebesar 0.123.

Pengujian Hipotesis

a. Uji F

**Tabel 4.8
Hasil Uji F**

Model	F	Sig.
Regression	20.829	0.000 ^b
Residual		
Total		

Sumber: Hasil olah data SPSS

Berdasarkan tabel 4.8 tersebut menunjukkan bahwa hasil uji ANOVA atau *F test* diatas, didapat nilai F sebesar 20.829 dengan tingkat probabilitas (signifikan) sebesar 0.000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dibawah tingkat signifikansi 0.05, maka H_0

ditolak dan H_a diterima. Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antar variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap alokasi anggaran belanja modal.

b. Uji Koefisien Determinasi

**Tabel 4.9
Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model	R Square	Adjusted R Square
1	0.676	0.643

Sumber: Hasil olah data SPSS

Dari tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai R^2 dan nilai adjusted R^2 masing-masing sebesar 0.676 dan 0.643 dapat dijadikan persen dengan nilai R sebesar 67.6% dan R^2 64.3%. Maka dapat disimpulkan hasil

sebesar 64.3% perubahan alokasi anggaran belanja modal dapat dipengaruhi oleh variabel pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum, sedangkan sisanya 35.7%

dipengaruhi oleh variabel lain dari luar model.

c. Uji t

Tabel 4.10
Hasil Uji Statistik t

	B	Sig.
(Constant)	1.303E+10	0.787
Pertumbuhan Ekonomi	3.695	0.096
PAD	0.919	0.062
DAU	0.123	0.236

Sumber: Hasil olah data SPSS

1. Uji Hipotesis Pertama (H1)

Pada hipotesis pertama menunjukkan bahwa t hitung sebesar 1.721 dengan nilai signifikan 0.096. Diketahui bahwa nilai signifikan lebih dari 0.05 ($0.096 > 0.05$), sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. Disimpulkan bahwa Anggaran Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi anggaran belanja modal.

2. Uji Hipotesis Kedua (H2)

Pada hipotesis kedua menunjukkan bahwa t hitung sebesar 1.936 dengan nilai signifikan 0.062. Diketahui bahwa nilai signifikan lebih dari 0.05 ($0.062 > 0.05$), sehingga H0 diterima dan H2 ditolak. Disimpulkan bahwa Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi anggaran belanja modal. Semakin tinggi PAD dalam suatu daerah, maka alokasi belanja modal yang dilakukan akan meningkat atau memiliki hubungan yang positif.

3. Uji Hipotesis Ketiga (H3)

Pada hipotesis ketiga menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 1.208 dengan nilai

signifikan 0.236. Diketahui bahwa nilai signifikan lebih dari 0.05 ($0.236 > 0.05$), sehingga H0 diterima dan H3 ditolak. Disimpulkan bahwa Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi anggaran belanja modal. Semakin tinggi DAU dalam suatu daerah, maka alokasi belanja modal yang dilakukan akan meningkat atau memiliki hubungan.

Pembahasan

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

Otonomi daerah mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Perbedaan kemampuan daerah yang satu dengan daerah lainnya dalam mengelola potensi lokalnya dan ketersediaan sarana dan prasarana serta sumber daya menyebabkan pertumbuhan ekonomi antar satu daerah dengan daerah yang lain tidak sama. Adanya kebijakan otonomi daerah mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Semakin tinggi tingkat

pertumbuhan ekonomi tentu akan mengakibatkan bertumbuhnya investasi modal swasta maupun pemerintah. Hal ini yang mengakibatkan pemerintah lebih leluasa dalam menyusun anggaran belanja modal.

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa anggaran pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja modal sehingga H1 ditolak. Berdasarkan statistik deskriptif menunjukkan bahwa selama periode 2012-2016 anggaran pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur kecuali kabupaten/kota Sumenep pada tahun 2015 untuk pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. Untuk anggaran alokasi belanja modal mengalami penurunan dari beberapa kabupaten/daerah seperti Bangkalan, Banyuwangi (2012-2013), Batu, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Jember (2012-2014), Jombang, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang (2012-2015), Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, dan Tulungagung.

Hal ini disebabkan karena daerah tersebut tidak dapat mengelola alokasi anggaran belanja modal dengan baik yang seharusnya belanja modal dapat menambah nilai anggaran pertumbuhan. Pemerintah dari beberapa daerah tersebut juga tidak mampu mengelola sumber daya manusia dan sumber daya alam di daerah tersebut yang seharusnya sumber daya manusia dan sumber daya alam jika dikelola dengan baik

dapat membentuk suatu kegiatan yang dapat menarik investor untuk menanam modal di daerah tersebut.

Hasil ini sesuai dengan ekspektasi awal dan tidak bertentangan dengan hasil penelitian empiris terdahulu yaitu Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007). Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal karena dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi tidak mempunyai dampak secara langsung terhadap belanja modal.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat dimaknai dengan semakin tingginya pemerintah dalam mengembangkan dan mengelola potensi daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat diukur dengan tingginya jumlah anggaran PAD yang didapat oleh setiap daerah maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian setiap daerah dalam mengelola dan meningkatkan potensi daerah di Jawa Timur. Alokasi anggaran belanja modal diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik karena hasil dari pengeluaran belanja modal merupakan meningkatnya aset daerah yang menjadi syarat memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Anggaran Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja modal yang berarti H2 ditolak. Pada data statistik

deskriptif menunjukkan bahwa selama periode 2012-2016 anggaran pendapatan asli daerah dan alokasi anggaran belanja modal mengalami kenaikan. Tidak adanya pengaruh disebabkan karena adanya beberapa daerah yang memiliki nilai pendapatan asli daerah dibawah rata-rata seperti kota Bangkalan, Blitar, Bojonegoro, Lamongan, Lumajang, Malang, Mojokerto, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, dan Trenggalek.

Hal ini terjadi karena kemungkinan di daerah tersebut kurangnya penggalian sumber-sumber penerimaan baru, seharusnya setiap daerah meningkatkan anggaran PAD melalui upaya ekstensifikasi yaitu dengan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, upaya ini harus diarahkan dengan mempertahankan dan menggali potensi daerah agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Anggaran PAD yang rendah juga disebabkan karena lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja yang lain, seperti belanja rutin/belanja operasional. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ikhwan Prasetya (2017) memberikan hasil penelitian yang sama dengan penelitian ini yaitu pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wandira Arbie Gugus (2013) juga memberikan hasil penelitian yang sama yaitu pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DAU) untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal. Ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat (DAU) menjadi semakin tinggi. Hal ini memberikan adanya indikasi kuat bahwa perilaku belanja daerah khususnya belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan anggaran DAU. Semakin tinggi anggaran DAU maka alokasi anggaran belanja modal semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena daerah yang memiliki pendapatan (DAU) yang besar maka alokasi anggaran belanja daerah akan meningkat.

Hasil analisis regresi linier berganda pada penelitian ini menunjukkan bahwa Anggaran Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja modal maka H3 ditolak. Berdasarkan statistik deskriptif dari tahun 2012-2016 bahwa variabel Anggaran Dana Alokasi Umum selalu mengalami peningkatan. Anggaran Dana Alokasi Umum menjadi tidak berpengaruh karena disebabkan adanya beberapa daerah yang memiliki nilai dibawah rata-rata seperti kota Blitar, Bojonegoro (2012), Malang (2013), Mojokerto, Pamekasan (2012-2014), Probolinggo, dan Sampang.

Hal ini bisa disebabkan karena pada kota tersebut dana alokasi umum yang diterima oleh daerah hanya diperuntukkan untuk membiayai pengeluaran rutin dan tidak mempunyai daerah tersebut untuk mengelola dana yang didapat dari APBN. Hal ini menunjukkan

bahwa variabel dana alokasi umum tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel belanja modal. Sejalan dengan penelitian Wahyudi Maria Valencia dan Nur Handayani (2015) yang membuktikan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh positif terhadap belanja modal.

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap alokasi anggaran belanja modal. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan kabupaten/kota di Jawa Timur pada periode pengambilan data 2012-2016 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Anggaran Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
2. Anggaran Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
3. Anggaran Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain sebagai berikut:

1. Tidak adanya variabel yang berpengaruh dalam penelitian ini sehingga masih diperlukan penelitian lain dengan menambah beberapa variabel yang dapat mempengaruhi.
2. Keterbatasan pada penelitian ini hanya menggunakan Laporan Anggaran pada setiap daerah,

tidak menggunakan Laporan Realisasi dari setiap daerah.

Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dan menarik kesimpulan dari penelitian ini, makasaran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, peneliti diharapkan mempertimbangkan pengembangan variabel yang akan digunakan selain yang digunakan peneliti saat ini.
2. Diharapkan pada penelitian selanjutnya, peneliti dapat menambah periode penelitian agar menghasilkan output penelitian yang lebih akurat.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul, Halim dan Syukriy Abdullah. 2004. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemda: Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali. *Jurnal Ekonomi STEI*. No. 2/Tahun XIII/25.
- Anthony, N. Robert dan Govindarajan, Vijay. 2011. *Sistem Pengendalian Manajemen. Jilid 2*. Tangerang: Karisma Publishing Group.
- Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Bastian, Indra. 2002. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Edisi Pertama. Yogyakarta:

- BPFE-UGM dan Pusat Pengembangan Akuntansi (PPA) Universitas Gadjah Mada.
- Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X*, Makasar, 26-28 Juli 2007.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariant dengan Program IBM SPSS 21*. Edisi 7, Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harianto, David dan Priyo Hari Adi. 2007. *Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita*. Simposium Nasional Akuntansi X Unhas Makassar 26-28 Juli 2007.
- Hidayah, Nurul dan Hari Setiyawati. 2014. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung di Propinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi*. Volume XVIII, No. 01 Januari:45-58.
- Jaya, I putu Ngurah Panji Kartika dan A.A.N.B. Dwirandra. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 7.1:79-92.
- Kawedar, Warsito, A. Rohman dan S. Handayani. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Buku I. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Kuznets, Simon. 1995. "Economic Growth and Income Inequality". American Economic Review.
- Luh Putu Rani Mayasari, Ni Kadek Sinarwati, Gede Adi Yuniarta, 2014. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengelokasiaan Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng*, e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Genesha, Jurusan Akuntansi Program S1, Volome 2 No.1 Tahun 2014.
- Martini, Ni Luh Dina Selvia, Wayan Cipta, dan I Wayan Suwendra. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Buleleng Tahun 2006-2012. *E-Journal Bisma Universitas*

- Pendidikan Ganesha*
Jurusan Manajemen.
Volume 2.
- Nuarisa, Sheila Ardhian. 2013. Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*.
- Pelealu, Andreas Marzel. 2013. Pengaruh Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado 2003-2012. *Jurnal EMBA*. Vol. 1 No. 4 Desember, Hal 1189-1197.
- Prasetya, Ikhwan. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Belanja Pegawai Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Jurnal Akuntansi 2017*.
- Putra, Putu Gde Mahendra dan I Gusti Ketut Agung Ulupui. 2015. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 11.3:863-877.
- Republik Indonesia. *Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*.
- Republik Indonesia. *Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Direktorat Jendral Otonomi Daerah, Jakarta*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dearah*.
- Saragih, Juri Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sujarweni, Wiratna. 2015. *SPSS Untuk Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press
- Syaiful, 2008. *Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan*. www.bappenas.go.id.
- Wahyudi, Maria Valencia dan Nur Handayani. 2015. Pengaruh Pajak, Retribusi Daerah, DAU, dan DAK Terhadap Alokasi Anggaran Belanja

Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol. 4 No. 11.

Wandira, Arbie Gugus. 2013. Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal 2*.





